

KORUPSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI INDONESIA

Nugroho SBM

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Semarang

Jl. Prof Sudharto SH Tembalang

Email: *nugroho_sbm@yahoo.co.id*

Abstrak

Tingkat Korupsi di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International. Penelitian ini menganalisis pengaruh PDB, populasi wanita, tingkat pendidikan dan keterbukaan ekonomi terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Studi ini menunjukkan PDB variabel, populasi wanita, dan tingkat pendidikan yang dipamerkan secara signifikan mempengaruhi tingkat korupsi di Indonesia, sedangkan tingkat keterbukaan ekonomi tidak signifikan mempengaruhi tingkat korupsi di Indonesia .. Variabel yang paling berpengaruh adalah populasi wanita. Ini berarti kebutuhan untuk posisi publik yang lebih diberikan kepada perempuan untuk meminimalkan korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, PDB, Penduduk Wanita, Pendidikan, Keterbukaan Ekonomi

Abstract

Levels of Corruption in Indonesia is still high compared to the other countries of the world seen from the Corruption Perception Index published by Transparency International. This study analyzed the influence of GDP, female population, education level and economic openness to the level of corruption in Indonesia. The study shows the variables GDP, female population, and education levels exhibited significantly affect the level of corruption in Indonesia, while the level of economic openness does not significantly affect the level of corruption in Indonesia .. The most influential variable is female population. This implies the need for more public positions given to women to minimize corruption.

Keywords: Corruption, GDP, Female Population, Education, Economic Openess

Latar Belakang

Tingkat korupsi di Indonesia sampai saat ini masih tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari posisi Indonesia yang tidak beranjak jauh dari posisi negara yang korup yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi yang dihitung Oleh *Transparency International* (TI) seperti dapat dilihat pada Tabel 1.1. Padahal seharusnya tingkat korupsi di Indonesia menurun karena telah dilakukan berbagai hal untuk menurunkan tingkat korupsi tersebut. Berbagai hal tersebut antara lain: membuat UU Khusus Tindak Pidana Korupsi, membentuk Peradilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan terakhir dengan membentuk lembaga "*Super Body*" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disebabkan antara lain belum dipahaminya secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia.

Pentingnya upaya-upaya untuk menekan tingkat korupsi di Indonesia dilandasi oleh beberapa dampak negatif korupsi. Berapapai dampak negatif korupsi tersebut antara lain (Mauro, 1995 dan 1997) :

1. mengurangi pertumbuhan ekonomi
2. meningkatkan kesenjangan sosial
3. menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi,
4. mengurangi efektifitas kebijakan publik ,
5. mengurangi penerimaan pemerintah dari pajak karena pegawai pajak menerima suap,
6. terabaikannya penyediaan barang publik.

Beberapa studi telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Tetapi studi-studi tersebut lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif dan dari sudut pandang ilmu hukum. Sedangkan studi dengan pendekatan kuantitatif dan dari sudut pandang ekonomi dengan menggunakan variabel-variabel ekonomi (makro) masih jarang dilakukan. Oleh karena itu studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif dan dari sudut pandang ilmu ekonomi dengan menggunakan variabel-variabel ekonomi perlu dilakukan.

Tabel 1
Indeks Persepsi korupsi dan Peringkat Indonesia dalam Hal Negara Terbersih
atau Terkorup di dunia Tahun 1998-2010

Tahun	Indeks Persepsi korupsi *)	Rangking dalam Negara Terbersih	Rangking dalam Negara Terkorup	Jumlah Negara yang Disurvei
1998	2,0	80	5	85
1999	1,7	96	3	99
2000	1,7	85	4	90
2001	1,9	88	4	91
2002	1,9	96	6	102
2003	1,9	122	6	133
2004	2,0	130	5	146
2005	2,2	137	6	159
2006	2,4	130	7	163
2007	2,3	143	10	180
2008	2,6	126	15	180
2009	2,8	111	18	180
2010	2,8	110	18	178

Sumber : *Transparency Internasional, tahun 1998-2009*

Keterangan : *) Indeks Persepsi korupsi besarnya antara 0 (menunjukkan suatu negara sangat korup) sampai 10 (menunjukkan suatu negara sangat Bersih)

Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan fenomena (*fenomena gap*) dan kesenjangan penelitian (*research gap*).

Kesenjangan fenomena (*fenomena gap*) dari penelitian ini adalah meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk menekan tingkat korupsi, antara lain: membuat UU Khusus Tindak Pidana Korupsi, membentuk Peradilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan terakhir dengan membentuk lembaga "*Super Body*" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disebabkan antara lain belum dipahaminya secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia.

Sedangkan kesenjangan penelitian (*research gap*) dari penelitian ini adalah selama ini analisis tentang korupsi di Indonesia lebih banyak dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan dari sudut hukum. Maka perlu dilakukan penelitian dengan: menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda dan menggunakan pendekatan ilmu ekonomi dengan cara menganalisis variabel-variabel ekonomi (makro) yang mempengaruhi terjadinya korupsi di Indonesia dan bukan variabel hukum seperti yang selama ini digunakan dalam analisis korupsi di Indonesia.

Pengertian Korupsi dan Cara Pengukurannya

Pengertian Korupsi

Meskipun kelihatannya sederhana, sangatlah sulit dalam praktek untuk mendefinisikan korupsi. Wu (2003) menyatakan ada 3 (tiga) sebab mengapa mendefinisikan korupsi sangat sulit. Pertama, definisi korupsi sangat terkait dengan budaya suatu masyarakat. Contohnya: pemberian atau kenang-kenangan kepada sesama rekan bisnis atau dari kaum bisnis kepada pejabat publik dalam masyarakat barat yang sangat ketat memegang hukum serta pendekatan hubungan bisnis bersifat formal dan *business like*, bisa dikategorikan setiap suap atau korupsi. Tetapi bagi masyarakat timur seperti di China, Korea, dan Taiwan pemberian seperti itu dianggap sebagai hal biasa karena hubungan bisnis yang lebih bersifat informal dan personal. Tradisi seperti ini sering disebut *guanxi* (Chen, 1994 dalam Wiryawan dan Wiryawan 2003). Kedua, penilaian korupsi sering terpisahkan atau bertentangan dengan nilai-nilai moral. Ada perbuatan yang tidak bisa dikategorikan sebagai korupsi, namun secara moral salah. Sebaliknya, ada tindakan yang secara moral betul tetapi sebenarnya merupakan tindakan korupsi. Ketiga, banyak aktifitas atau tindakan yang berada pada wilayah abu-abu (*grey area*) dimana motivasi dari si pemberi suap perlu dilihat atau dicermati.

Meskipun mencari definisi korupsi sangatlah sulit, tetapi ada beberapa pihak dan peneliti maupun penulis yang mencoba mencari definisi korupsi tersebut. Dalam ilmu ekonomi korupsi sering disebut sebagai kegiatan mencari rente (*Rent Seeking Activity*). Dikatakan demikian karena seseorang yang menerima suap tidak melakukan atau terlibat dalam kegiatan produktif yang menciptakan nilai tambah (Ades dan Tella, 1999).

Konferensi Malta 1994 (dalam Wiryawan dan Wiryawan, 2003) mendefinisikan korupsi sebagai segala hal yang berebau kecurangan (*improbity* atau *dishonesty*). Batasan korupsi menurut Konferensi Malta ini sangat luas yaitu bukan saja tindakan yang melawan hukum tetapi juga melawan kepatutan secara moral yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Senada dengan batasan korupsi menurut Konferensi Malta, Coase (dalam Wiryawan dan Wiryawan, 2003) menyatakan bahwa korupsi di samping bisa dilakukan oleh pejabat publik, bisa juga dilakukan oleh pejabat swasta dalam sebuah perusahaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau pengelapan uang negara, uang perusahaan atau yang lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Sedangkan UU nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi yang kemudian direvisi menjadi UU nomer 20 tahun 2001, membagi tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi di luar yang diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), yang terdiri dari:
 - a. **Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum** yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masyarakat umum dan bukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan atau aparat pemerintah/negara.

- b. **Penyalahgunaan Kewenangan/kekuasaan** yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c. **Memberi Hadiah dengan Mengingat Kekuasaan** yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang dengan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan.
 - d. **Percobaan/Pembantuan/Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Korupsi**, yaitu tindakan seseorang untuk mencoba melakukan korupsi, membantu orang lain melakukan korupsi, dan bermufakat dengan orang lain untuk melakukan korupsi bisa dikategorikan telah melakukan tindak pidana korupsi.
 - e. **Sengaja Mencegah/Merintangi/Menggagalkan Penanganan Tindak Pidana Korupsi**, yaitu tindakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penyuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
 - f. **Dengan Sengaja Tidak Memberi Keterangan yang Benar**, yaitu tindakan setiap orang yang sengaja tidak memberi keterangan yang benar pada kasus tindak pidana korupsi.
 - g. **Menyebutkan Nama/Alamat Pelapor**, yaitu tindakan seseorang dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau saksi.
2. Tindak Pidana Korupsi yang Diatur atau Berasal dari KUHP, yaitu:
- a. **Suap**, yaitu memberikan hadiah atau janji kepada:
 - pegawai negeri atau penyelenggara negara agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sesuoleh orang lain, atau i kewenangannya.
 - Hakim agar mempengaruhi keputusan perkara
 - Advokat untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan.
 - b. **Penggelapan**, yaitu tindakan dari pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum yang secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan penggelapan itu.
 - c. **Pemerasan**, yaitu tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang membeeri sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
 - d. **Pengaduan yang berkenaan dengan Pemborong/Rekanan**, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh:
 - pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan yang dalam pembuatan bangunan atau penyerahan bahan bangunan yang dapat membahayakan orang, Tentara Nasional Indonesia, dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- orang yang menerima penyerahan bahan bangunan yang membiarkan terjadinya perbuatan curang.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan tersebut untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus/mengawasinya.

Pengukuran Korupsi

Menurut Fishman dan Gatti (2002) ada 4 cara mengukur tingkat korupsi yang terjadi di suatu negara :

1. **Indeks Korupsi versi *Intenational Country Risk Guide (ICRG)***
Besarnya Indeks antara 0 (tidak ada korupsi) sampai 1 (sangat korup). Skor atau indeks yang tinggi menunjukkan oknum pejabat pemerintah meminta pembayaran khusus dan illegal untuk aktivitas-aktivitas seperti lisensi ekspor-impor, pengendalian kurs, pengisian pajak, kebijakan proteksi dan pinjaman.
2. **Indeks Korupsi versi Eksportir Jerman atau *German Corruption Exporter Index (GCI)***
Indeks ini dikembangkan oleh Neumann (1994) dengan menghitung proporsi pembayaran pungutan ekspor terhadap total biaya.
3. **Indeks korupsi versi Laporan Daya Saing Dunia atau *World Competitiveness Report Corruption Index (WCRCI)***
Indeks ini mengukur praktek-praktek tidak semestinya dalam penyediaan barang publik.
4. **Indeks Persepsi Korupsi atau *Perception Corruption Index (CPI)***
Indeks ini dikeluarkan oleh organisasi Transparansi Internasional. Besarnya Indeks antara 0 (sangat korup) dan 10 (sangat bersih). Indeks ini dihasilkan dari survei terhadap pelaku usaha di beberapa negara.

Kuncoro (2002) menyatakan bahwa sampai tahun 1998 Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei tahunan yang diterbitkan dalam buku Statistik Industri. Dalam buku Statistik Industri tersebut dipaparkan biaya produksi dan non-produksi. Dalam biaya non-produksi ini ada pos “biaya lain-lain”. Biaya lain-lain inilah yang bisa dipakai sebagai *proxy* dari suap yang dilakukan pengusaha pada birokrat.

Reinika dan Svenson (2002 ; 2003) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) pendekatan yang bisa dipakai untuk mengukur dan menganalisis korupsi dengan pendekatan ekonomi. Pendekatan pertama, memakai data kerat lintang (*cross section*) antar negara. Pendekatan ini biasanya menitikberatkan pada faktor-faktor makro yang mempengaruhi terjadinya korupsi serta dampak korupsi pada perekonomian juga secara makro. Namun pendekatan ini biasanya sulit dan mahal dalam pengumpulan data (khususnya data kuantitatif). Pendekatan kedua, menggunakan data persepsi tentang korupsi dan juga data nominal kuantitatif pada tingkat mikro (khususnya dikumpulkan dari survei terhadap dunia swasta atau bisnis). Pendekatan ini lebih mudah dilakukan, lebih dapat dipercaya dan lebih bisa menjelaskan secara rinci (tidak terlalu makro) perilaku korupsi serta keterkaitannya dengan para agen (para pelaku secara individual). Pendekatan ketiga, menjelaskan korupsi sebagai fungsi atau dipengaruhi oleh kebijakan serta kelembagaan yang ada pada sebuah negara.

Wu (2003) mencoba mengkompilasikan beberapa indeks dan ukuran yang selama ini dipakai di dunia untuk mengukur korupsi yang sebagian telah diuraikan di depan. Beberapa indeks atau ukuran itu adalah :

1. *Corruption perception indeks (CPI)* yang disusun oleh *Transparency International*.
2. *International Country Risk Guide (ICRG)*
3. *Business International (BI) Index*
4. indikator yang disusun dalam *Internasional Financial Statistics (IFS)* oleh IMF
5. Salah satu indikator dalam *World Development Indicators* yang tercantum dalam *World Development Report* yang disusun oleh Bank Dunia.
6. *World Business Environment Survey (WBES)* yang disusun oleh Bank Dunia
7. *Global Competitiveness Survey*
8. *World Competitiveness Report*
9. *German Exporter Index*
10. Indeks yang disusun oleh *Standart and Poor*
11. indeks versi *Gallup Internasional*
12. *Public Expenditure Tracking Survey (PETS)* yang mencoba mengukur korupsi dari kebocoran yang terjadi dalam penyediaan barang dan jasa public khususnya jasa kesehatan dan pendidikan (Reinika,2002)
13. *Quantitative Service Delivery Survey (QSDS)* yang mencoba mengukur korupsi dari kebocoran dalam penyediaan barang dan jasa publik khususnya kesehatan dan pendidikan (Reinika, 2002).

Penelitian Terdahulu

Mauro (1997) menggunakan data 100 negara dengan menggunakan regresi berganda menyimpulkan bahwa penyebab korupsi yaitu adanya pembatasan perdagangan, adanya subsidi, pengendalian harga, penentuan kurs yang berbeda untuk berbagai keperluan, gaji pegawai negeri yang rendah, berlimpahnya kekayaan alam, dan faktor-faktor sosial budaya.

Sementara itu, Tanzi (1998) dengan menggunakan beberapa Negara sebagai sampel dengan alat analisis regresi menemukan bahwa korupsi berdampak mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah regulasi pemerintah yang rumit, sistem perpajakan yang tidak baik, pengeluaran pemerintah yang tidak efisien, kualitas birokrasi yang buruk, gaji pegawai negeri yang rendah, minimnya keberadaan lembaga pengawasan, sistem hukum yang jelek.

Swammy (2000) dengan mengambil 1.717 orang manajer senior laki-laki dan 502 manajer senior wanita di Negara bagian Georgia menemukan bahwa wanita mempunyai keterlibatan yang lebih kecil dalam korupsi dibanding laki-laki.

Sementara itu Trisman (2000) dengan menggunakan data dari 85 negara di dunia menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu sistem hukum yang lemah, agama yang dianut, tingkat demokratisasi yang masih rendah, perkembangan ekonomi yang masih dalam tahap awal, gaji pegawai negeri yang rendah, intervensi Negara yang terlalu besar, kekayaan alam yang berlimpah, dominasi etnis tertentu, dan tingka desentralisasi yang tinggi. Penjelasan lebih lanjut dari faktor agama adalah dari penelitiannya dengan membandingkan dua komunitas agama satu beragama katolik dan satu protestan. Ternyata yang beragama protestan mempunyai kecenderungan korupsi lebih rendah. Karena komunitas protestan lebih terbuka sedangkan komunitas katolik lebih tertutup dan ada mekanisme pengakuan dan pengampunan dosa.

Gurgur dan Anwar Shah (2005) dengan data dari 30 negara menemukan bahwa desentralisasi fiskal telah mengurangi korupsi, tetapi dampak pengurangan korupsi akibat desentralisasi fiskal tersebut lebih besar di Negara kesatuan dibanding di Negara federasi. Faktor – faktor yang menjadi penyebab korupsi adalah besarnya peran pemerintah dalam perekonomian, tingkat keterbukaan ekonomi yang

kurang, struktur ekonomi yang tidak baik, kurangnya kuantitas dan kualitas lembaga pengawasan, tingkat perkembangan social yang masih rendah, serta rendahnya gaji pegawai negeri.

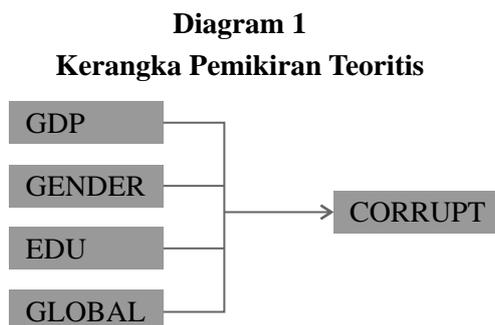
Herzfeld dan Weiss (2005) dengan menggunakan data 72 negara menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi adalah pertumbuhan ekonomi, agama, gaji pegawai negeri, tingkat demokrasi, stabilitas politik, keterbukaan ekonomi, kekayaan alam, heterogenitas masyarakat dan penegakan hukum.

Ekstrand (2005) menyimpulkan dalam studinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi yaitu: tingkat demokrasi, pendapatan nasional riil, iklim, tingkat melek huruf, tingkat harapan hidup, hak politik, kebebasan pers, tingkat mortalitas bayi, ukuran rumahtangga, jumlah penduduk, country risk, indeks pembangunan manusia, dan agama.

Shabbir dan Anwar (2007) menyimpulkan ada beberapa variabel yang mempengaruhi korupsi yaitu tingkat perkembangan ekonomi (diukur dengan GDP), kebebasan ekonomi (diukur dengan Indeks Kebebasan Ekonomi), globalisasi (diukur dengan persentase ekspor dikurangi impor terhadap GDP), tingkat pendidikan (diukur dengan angka melek huruf), dan distribusi pendapatan (diukur dengan Gini Rasio).

Kerangka Pemikiran Teori

Atas dasar tinjauan teori dan penelitian terdahulu serta dengan pertimbangan kecukupan serta ketersediaan data maka kerangka pemikiran teori dari penelitian ini dapat dilihat pada Diagram 1.



Metode Penelitian

Data dan Sumbernya

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diterbitkan oleh *Transparency International* dan Badan Pusat Statistik

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang diestimasi dengan menggunakan paket program SPSS.

Model yang Digunakan

Dengan mempertimbangkan kecukupan dan ketersediaan data maka model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi produksi Cobb- Douglas sebagai berikut:

$$\text{CORRUPT} = 0. \text{GDP}^1 \cdot \text{GENDER}^2 \cdot \text{EDU}^3 \cdot \text{GLOBAL}^4$$

Dari fungsi produksi Cobb-Douglas tersebut kemudian ditrasformasikan menjadi bentuk logaritma natural sebagai berikut:

$$\text{LnCORRUPT} = \text{Ln } 0 + 1 \text{ Ln GDP} + 2 \text{ Ln GENDER} + 3 \text{ Ln EDU} + 4 \text{ Ln GLOBAL}$$

Keterangan:

CORRUPT = Tingkat Korupsi di Indonesia diukur dg Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International, makin besar Indeks menunjukkan makin rendah tingkat korupsi

GDP = Gross Domestic Product Indonesia

GENDER = Jenis kelamin penduduk Indonesia

EDU = Tingkat pendidikan penduduk Indonesia

GLOBAL = Tingkat globalisasi atau keterbukaan ekonomi Indonesia

Adapun alasan mentransformasikan fungsi menjadi bentuk logaritma natural adalah:

1. Mendekatkan skala data sehingga estimasi akan terbebas dari heteroskedastisitas
2. Parameter regresi bias langsung dibaca sebagai elastisitas.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

NO	VARIABEL	KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL
1	CORRUPT	Tingkat Korupsi di Indonesia	Indeks Persepsi Korupsi yang dipublikasikan Oleh <i>Transparency International</i> makin besar Indeks menunjukkan makin rendah tingkat korupsi
2	GDP	Gross Domestic Product Indonesia	GDP Indonesia atas Dasar Harga Konstan dalam satuan RP
3	GENDER	Jenis Kelamin Penduduk Indonesia	Jumlah Penduduk Perempuan di Indonesia dalam satuan orang
4	EDU	Tingkat Pendidikan Penduduk Indonesia	Tingkat Melek Huruf dalam satuan persentase
5	GLOBAL	Tingkat Globalisasi perekonomian Indonesia	Persentase Net Export terhadap GDP dalam satuan persentase

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang menunjukkan pengaruh variabel independen yaitu GDP, Jenis Kelamin Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Globalisasi Indonesia terhadap variabel dependen yaitu tingkat korupsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3
Ringkasan Hipotesis Penelitian

NO	VARIABEL INDEPENDEN	PENGARUHNYA TERHADAP VARIABEL DEPENDEN (CORRUPT)
1	GDP	Negatif
2	GENDER	Positif
3	EDU	Positif
4	GLOBAL	Positif

Catatan: Variabel Corrupt diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dimana makin besar indeks menunjukkan makin rendah tingkat korupsi. Dengan demikian, hipotesis juga "terbalik", misal makin tinggi GDP makin besar corrupt artinya justru makin besar GDP maka IPK makin turun, yang artinya justru korupsi makin naik karena kenaikan GDP membuat "basis" melakukan korupsi makin besar.

2. Hasil Regresi : Korupsi dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Setelah lolos dari berbagai uji kebaikan model yaitu uji normalitas, deteksi autokorelasi, deteksi multikolinieritas, dan deteksi heteroskedastisitas, Hasil regresi faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4
Signifikansi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi di Indonesia

NO	VARIABEL INDEPENDEN	PARAMETER	T hit	KETERANGAN
1	GDP	- 3,059	- 4,710	Signifikan pada = 5%
2	GENDER	2,871	3,529	Signifikan pada = 5%
3	EDU	0,654	3,050	Signifikan pada = 5%
4	GLOBAL	0,034	0,352	Tidak Signifikan
R ² = 0,980				

Sumber: Hasil perhitungan

Keterangan: Variabel Dependennya CORRUPT atau Tingkat Korupsi di Indonesia yang diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dihitung dan diterbitkan Oleh *Transparency International*

Tabel 4 tentang hasil regresi faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi di Indonesia menunjukkan beberapa hal:. Pertama, dari koefisien determinasi (R²) sebesar 0,980 dapat diartikan bahwa naik turunnya atau variasi variabel CORRUPT atau tingkat korupsi di Indonesia yang diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 98 persen dipengaruhi oleh variasi atau naik turunnya variabel independen yang dipilih yaitu pendapatan nasional (GDP), jenis kelamin penduduk (GENDER), tingkat pendidikan penduduk (EDU), dan tingkat keterbukaan ekonomi (GLOBAL). Sedangkan hanya 2 persen yang dipengaruhi oleh hal lain yaitu variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model dan kesalahan dalam data dan pengukuran variabel. Berarti model yang dipilih mendekati gambaran kenyataannya.

Kedua, tanda dari parameter variabel independen yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di Indonesia yang menunjukkan arah pengaruh variabel tersebut terhadap tingkat korupsi di Indonesia sesuai dengan hipotesis. Pengaruh variabel pendapatan nasional (GDP) yang diukur dengan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan dilihat dari tanda parameternya adalah negatif terhadap CORRUPT yang diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) artinya makin tinggi GDP makin rendah IPK atau makin tinggi tingkat korupsi.. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dilandasi oleh teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan nasional Indonesia akan semakin tinggi tingkat korupsinya. Logikanya adalah semakin makmur suatu negara – yang berarti semakin maju kegiatan perekonomiannya- tanpa dibarengi upaya untuk menekan tindak kejahatan korupsi maka akan semakin menjadi lahan subur untuk praktek korupsi. Ada pepatah mengatakan "Ada Gula Ada Semut". Variabel jenis kelamin (GENDER) yang diukur dengan jumlah penduduk wanita, parameternya bertanda positif berarti hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa semakin besar jumlah

penduduk wanita di Indonesia akan semakin besar IPK yang berarti semakin rendah tingkat korupsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dilandasi teori dan penelitian terdahulu bahwa wanita mempunyai perilaku lebih tidak korup dibanding lelaki. Variabel pendidikan (EDU) yang diukur dengan persentase Angka Melek Huruf juga parameternya mempunyai tanda positif yang artinya pengaruh tingkat pendidikan penduduk terhadap IPK adalah positif atau di sisi lain negatif terhadap tingkat korupsi. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia akan semakin rendah tingkat korupsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dilandasi teori dan penelitian sebelumnya bahwa makin tinggi tingkat pendidikan akan membuat seseorang makin sadar akan etika dan moral serta hukum sehingga akan semakin menghindari tindakan tercela dan melawan hukum seperti korupsi. Variabel keterbukaan ekonomi (GLOBAL) yang diukur dengan persentase net ekspor (Ekspor dikurangi impor) terhadap GDP parameternya bertanda positif Artinya semakin terbuka ekonomi Indonesia akan semakin besar IPK yang artinya semakin rendah tingkat korupsinya. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dilandasi oleh teori dan penelitian terdahulu bahwa semakin terbuka ekonomi Indonesia akan semakin rendah tingkat korupsi di Indonesia. Logikanya adalah semakin terbuka ekonomi suatu negara akan meningkatkan tuntutan untuk semakin transparan dalam pengelolaan dan manajemen ekonomi suatu negara. Pengelolaan dan manajemen ekonomi yang transparan dan bersih akan menurunkan biaya melakukan investasi dan ini merupakan daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di negara tersebut.

Ketiga, dari uji t atau uji signifikansi individual ternyata hanya ada 3 (tiga) dari 4 (empat) variabel yang secara statistik berpengaruh secara signifikan yaitu pendapatan nasional (GDP), jenis kelamin (GENDER), dan tingkat pendidikan (EDU). Sedangkan variabel tingkat keterbukaan ekonomi (GLOBAL) tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil studi berupa pengaruh yang positif dan signifikan dari pendapatan nasional (GDP) terhadap tingkat korupsi sesuai dengan penelitian Trisman (2000), Ekstrand (2005) dan Thomas Herzfeld dan C weiss (2005). Sebagaimana telah disebut tingkat korupsi akan semakin tinggi di negara-negara dengan pendapatan nasional yang tinggi. Logikanya pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi pula dan kegiatan ekonomi yang tinggi merupakan lahan subur untuk kegiatan korupsi. Pengaruh yang negatif dan signifikan jumlah penduduk wanita (GENDER) terhadap tingkat korupsi sesuai dengan penelitian Swamy (2000). Pengaruh pendidikan (EDU) yang negatif dan signifikan sesuai dengan penelitian Ekstrand (2005). Satu-satunya variabel yang tidak signifikan adalah tingkat keterbukaan ekonomi (GLOBAL). Hal ini disebabkan karena sampai saat ini tingkat keterbukaan ekonomi Indonesia yang diukur dengan persentase net ekspor (ekspor dikurangi impor) masih rendah. Tingkat keterbukaan ekonomi Indonesia berdasarkan data tahun 2010 baru mencapai 0,97 persen.

Keempat, dilihat dari besarnya parameter maka variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Indonesia adalah pendapatan nasional (GDP). Berikutnya disusul oleh variabel jenis kelamin (GENDER), dan tingkat pendidikan (EDU).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab V yaitu hasil dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi adalah sebesar 0,980 dapat diartikan bahwa naik turunnya atau variasi variabel CORRUPT atau tingkat korupsi di Indonesia yang diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 98 persen dipengaruhi oleh variasi atau naik turunnya variabel independen yang dipilih yaitu pendapatan nasional (GDP), jenis kelamin penduduk (GENDER),

tingkat pendidikan penduduk (EDU), dan tingkat keterbukaan ekonomi (GLOBAL). Sedangkan hanya 2 persen yang dipengaruhi oleh hal lain yaitu variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model dan kesalahan dalam data dan pengukuran variabel. Berarti model yang dipilih mendekati gambaran kenyataannya.

2. Tanda dari parameter variabel independen yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di Indonesia yang menunjukkan arah pengaruh variabel tersebut terhadap tingkat korupsi di Indonesia sesuai dengan hipotesis.
3. Dari uji t atau uji signifikansi individual ternyata hanya ada 3 (tiga) dari 4 (empat) variabel yang secara statistik berpengaruh secara signifikan yaitu pendapatan nasional (GDP), jenis kelamin (GENDER), dan tingkat pendidikan (EDU). Sedangkan variabel tingkat keterbukaan ekonomi (GLOBAL) tidak berpengaruh secara signifikan.
4. Dilihat dari besarnya parameter maka variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Indonesia adalah pendapatan nasional (GDP). Berikutnya disusul oleh variabel jenis kelamin (GENDER), dan tingkat pendidikan (EDU).

Saran

Atas dasar hasil studi yang telah disimpulkan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Jabatan publik yang rawan terhadap praktek korupsi hendaknya diutamakan dijabat oleh wanita karena dari hasil studi pengaruh jumlah penduduk wanita berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di Indonesia
2. Peningkatan tingkat pendidikan penduduk juga merupakan hal yang terus dilakukan karena dari hasil studi, tingkat pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.
3. Untuk penelitian mendatang bisa ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi korupsi dan juga bisa digunakan alat analisis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ades, A.; R Di Tella, 1999, "Rents, Competition and Corruption", *American Economic Review*, 89, pp 982-9993
- Alatas, Vivi, Lisa Cameron, Ananish Chauduri, Nisvan Erkal, Lata Gangadharan, 2009, "Gender, Culture, and Corruption: Insight from an Experimental Analysis", *Southern Economic Journal*, 75(3), 663-680.
- Anonim, *Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Andvig, Jens Chr, et al, 2000, "Research on Corruption: A Policy Oriented Survey" tersedia di http://www.icgg.org/downloads/contribution07_andvig.pdf
- Mac Arthur John, Teal, Francis, "Corruption and Firm Performance in Africa", *World Bank Working Papers* No 3486, tersedia di <http://www.csae.ox.ac.uk/workingpapers/pdfs/2002-10text.pdf>

- Arthur, John Mac;Teal Francis, 2004 “Corruption and Firm Performance in Africa”, tersedia di <http://www.csae.ox.ac.uk/workingpapers/pdfs/2002-10text.pdf>
- Bardhan, P., 1997, “Corruption and Development: A Review of Issues”, *Journal of Economic Literature*, 35, pp 1320-1346.
- Batra Geeta, Kaufmann D, Stone Andrew HW, “Investment Climate Arround The World: Voices of The Firms From World Business Environment Survey”, tersedia di [http://www.ifc.org/ifcext/economic.nsf/AttachmentsByTitle/IC-WBESGlobalPresentation/\\$FILE/wbesfinal.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/economic.nsf/AttachmentsByTitle/IC-WBESGlobalPresentation/$FILE/wbesfinal.pdf)
- Batra Geeta, Kaufmann D, Stone Andrew HW, “The Firm's Speak: What World Business Environment Survey Tells Us About Constraint's on Private Sector Development”, tersedia di <http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/firmsspeak.pdf>
- Chen Yanjing, Mahmud Yasar, Roderick M Rejesus, 2008, “Factors Affecting the Incidence of Bribery Payouts by Firms: A Cross-Country Analysis”, *Journal of Business Ethics*, 77, pp 231-244.
- Clarke, George RG, Xu Collin, 1982, “Ownership, Competition, and Corruption: Bribe Takers Versus Bribe Payers”, tersedia di <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN019155.pdf>
- Ekstrand, Lars, H (2005), “Socio-Cultural Factors Affecting Corruption and What To Do (A Study of Phsycolological and Other Non-Economic Macro Variables Affecting Corruption)”, tersedia di <http://www.sasnet.lu.se/ekstrand.pdf>
- Hasan Bisri, 2011, “Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dalam Mencegah Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara” tersedia di www.filesking.net/PEMERIKSAAN-PTJK-ppt--PPT.html, diakses Nopember 2011.
- Herrera, Anna Maria, 2003, “Bribery and The Nature of Corruption”, tersedia di https://www.msu.edu/~herrera20/documents/HR_Jul03.pdf
- Herzfeld, Thomas Weiss, “Corruption Legal in Effectiveness: An Empirical Investigation”, tersedia di <http://ideas.repec.org/a/eee/poleco/v19y2003i3p621-632.html>
- Johnson Simon, Kaufmann D, Mc Millan John, Woodruff Christopher, 2000, “ Why Do Firm's Hide? Bribe and Unofficial Activity After Communism”, *Journal of Publis Economics*, 76, pp 495-520, tersedia di <http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/whyhide.pdf>
- Kuncoro, Ari, 2004b, “Bribery in Indonesia: Some Evidence from Micro Level Data” *BIES*, 40 (3), pp 329-354.

- Kaufmann D.; Wei S.J, 1999, “Does 'Grease Money Speed Up The Wheels of Commerce?’”, World Bank Working Paper, tersedia di <http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/greasemoney.htm>
- Kuncoro, 2004a, “Bribery and Time Wasted in Indonesia: A Test of The Efficient Grease Hypothesis”, *EKI*, Vol 52, p 31-53.
- Kuncoro, Ari; Henderson, Vernon J, “Corruption in Indonesia”, *NBER Working Paper* No. 10674, tersedia di <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN019120.pdf>
- Kuncoro, Ari, 2001, “Construction of Regional Index of Doing Business”, *Laporan Penelitian*, UI, Jakarta.
- Kuncoro, Ari, 2000, “The New Laws of Decentralization and Corruption in Indonesia: Examination of Provincial and Distric Data”, *Prosiding Seminar*.
- Kuncoro, Mudrajad, dkk, 2004, “Short Study on Domestic Regulatory Constraint to Labour Intensive Manufacturing Export”, *Laporan Penelitian*, Pusat Studi Asia Pasifik, UGM, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 1996, *Manajemen Keuangan Internasional*, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- Lui Francis T, 1985, “An Equilibrium Queuing Model Of Bribery”, *Journal of Political Economy*, Volume 93, No. 4, tersedia di <http://new.hse.ru/sites/liaer2/education/DocLib/1/20050211-bureaucracy-seminar-Lui-1985.pdf>
- Mauro, Paulo, “Corruption and Growth”, *The quarterly Journal of economics*, Vol. 110 No. 3 (1995), tersedia online dari JSTOR, pp. 681-712.
- Mauro Paulo, “Why Worry About Corruption?”, *IMF Publication Series*, 1997, tersedia di <http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues6/issue6.pdf>
- Mocan, Naci, 2008, “What Determines Corruption? International Evidence From Micro Data”, *Economic Inquiry*, 46 (4), pp 493-511
- Musakhazim, 2007, *Utilitarianisme- Penjelasan Singkat*, tersedia di <http://musakhazim.wordpress.com/2007/05/07/utilitarianisme-penjelasan-singkat/>
- Powpaka, Samart, 2002, “Factor Affecting Manager's Decision to Bribe: An Empirical Investigation”, *Journal of Business Ethics*, 40 (3), pp 227-246.
- Regional Development Institute (REDI), 2003, “Survei Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Otonomi Daerah”, *Laporan penelitian*, Surabaya.

- Rahman, et al, "Estimating The Effects of Corruption: Implication For Bangladesh", *World Bank Working Paper* Tersedia di <http://wbln0018.worldbank.org/Research/workpapers.nsf/568b4463f7c6e237852567e500514be6/72ae371ac7b6234785256989006dc3e4?OpenDocument>
- Rose-Ackerman, S., 1996, "The Political Economy of Corruption: Causes and Consequences", World Bank Note, tersedia di
- Seldayo Harry; De Haan Jakob, 2005, "The Determinants of Corruption: A Reinvestigation", tersedia di
- Sung, Hung-En, 2005, "Between Demand and Supply: Bribery in International Trade", *Crime, Law & Social Change*, 44, pp 111-131.
- Argandona, Antonio, 2005, "Corruption and Companies: The Use of Facilitating Payments", *Journal of Business Ethics*, 60, pp. 251-264.
- Swammy, Anand, 1999, "Gender and Corruption", tersedia di <http://www.isnie.org/ISNIE99/Papers/swamy-paper.pdf>
- Svensson, Jacob, 2003, "Who Must Pay Bribes and How Much? Evidence From A Cross Section of Firms", *Quarterly Journal of Economics*, tersedia di : www.iies.su.se/~svenssoj/p207.pdf
- Tanzi, Vito, "Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures", *IMF Staff Papers* Vol 5 No. 4, tersedia di
- Transparency International, "Perception Corruption Index", Berbagai tahun.
- Transparency International Indonesia, 2005, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia".
- Triesman, Daniel, "The Causes of Corruption", *Journal of Public Economics*, Vol. 76, tersedia di <http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/treisman/causes.pdf>
- Vogl, F, 1998, "The Supply Side of Global Bribery", *Finance and Development*, 35, pp 30-33
- Wei, S.J, 2000, "How Taxing Is Corruption on International Investors?", *Review of Economics and Statistics*, 82 (1), pp 1-11.
- Wei, S.J, 1997, "Why is Corruption So Much More Taxing than Tax? Arbitrariness Kills, *NBER Working Papers* No 6255, tersedia di
- Wiryawan, Nizam Jim dan Zahrida Wiryawan, 2003, "Dampak Korupsi Terhadap Penanaman Modal Asing: Sebuah Studi Literatur dengan Catatan Perbandingannya di Indonesia", *Manajemen dan Usahawan Indonesia*, No 36.

Wu, Thomas, Corruption in China: Effect on Economic Development and Remedial Policies”,
Independent Study Paper, The Hongkong Polytechnic University.

Wu, Xun, “Determinant of Bribery in Asian Firms: Evidence From The World Business Survey”, tersedia
di http://www.spp.nus.edu.sg/docs/fac/wu_xun/Published%20Papers/bribery_feb2007.pdf